

ABSTRAK

Sistem zonasi adalah suatu kebijakan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang mengutamakan jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah yang dituju, kebijakan ini diterapkan untuk pemerataan akses Pendidikan dan mengurangi kesenjangan antara sekolah *favorite* dan *non-favorite*. Adanya penumpukan peserta didik pada salah satu sekolah sementara ada beberapa sekolah yang kuota penerimaan peserta didiknya belum terpenuhi. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah terhadap proses Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi di SMP Negeri 5 Lhokseumawe yang sesuai dengan pembagian wilayah zonasi dan wilayah luar zonasi serta hambatan dalam implementasi kebijakan pemerintah terhadap proses tersebut terkait komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan pemerintah dalam proses penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di SMP Negeri 5 Lhokseumawe pada wilayah dalam zonasi adalah setiap zonasi 70% dari daya tampung sekolah merupakan siswa yang berdomisili pada zonanya dengan dua pilihan sekolahnya, jika tidak tertampung dipilihan pertama maka sendirinya tertampung dipilihan kedua. 15% jalur afirmasi tanpa syarat dan ketentuan lainnya, 10% siswa berprestasi yang diterima tanpa syarat dan 5% siswa perpindahan tugas orang tua. Hambatan dalam pelaksanaan ini pada aspek komunikasi dan sumber daya. Pemerintah Kota Lhokseumawe juga disarankan untuk meninjau ulang pembagian wilayah zonasi, khususnya di daerah dengan rentang wilayah yang terlalu luas atau terpisah oleh wilayah lain. Penyesuaian zonasi dapat membantu mengoptimalkan pemerataan akses Pendidikan.

Kata Kunci: *Implementasi, Sistem Zonasi, PPDB*

ABSTRACT

The zoning system is a policy in the New Student Admission (PPDB) process that prioritizes the distance between students' residences and their chosen schools. This policy aims to ensure equitable access to education and reduce disparities between favored and less-favored schools. The issue of student overcrowding in certain schools while others remain under capacity highlights the challenges in its implementation. This study aims to examine how the government's zoning policy is implemented at SMP Negeri 5 Lhokseumawe, focusing on both zoned and non-zoned areas, as well as identifying the obstacles related to communication, resources, and bureaucratic structure. A qualitative method was employed, with data collected through observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the implementation of the zoning policy at SMP Negeri 5 Lhokseumawe allocates 70% of the school's capacity to students residing within the zone, with two school choices—if not accepted in the first choice, they are automatically considered for the second. Additionally, 15% is allocated for the affirmation path without specific requirements, 10% for outstanding students accepted unconditionally, and 5% for students whose parents have job transfers. The main obstacles identified were in communication and resource limitations. The Lhokseumawe City Government is also advised to review the division of zoning areas, especially in areas with a wide area span or separated by other areas. Zoning adjustments can help optimize equal access to education.

Keywords : Implementation,Zoning System, PPDB,